“KEMITRAAN INDONESIA-AUSTRALIA MELALUI PROGRAM MAMPU(MAJU PEREMPUAN INDONESIA UNTUK PENANGULANGAN KEMISKINAN) UNTUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN”.

Julita Silaban

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Komputer Indonesia,
Jl Dipatiukur 112-114 Bandung, 440132, Indonesia

Email:juliyoselina@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to know the partnership done by Indonesia-Australia through MAMPU programme (Empowering Indonesian Women In Poverty Reduction). In this cooperation there are 6 thematic objectives of the MAMPU programme: Improving women's access to government social protection programs, Improving women's access to employment and eliminating discrimination in the workplace, Improving conditions for women labor migration abroad, Strengthening women's leadership in Improve maternal health and reproductive health, Strengthen women's leadership in overcoming violence against women. The researchers also analyzed th ministry of national planning and development agency e benefits of partnership for each of the women's organizations that partnered with the MAMPU programme.

The research method used qualitative research method. Most of the data collected is based on observation, literature study, online data tracking. The study was conducted at the and Ministry Of National Planning And Development Agency the Australian Embassy.

The results of this study indicate the existence of cooperation between Indonesia-Australia in the economic empowerment of Indonesian women. Since 2012 it has resulted in a good impact for Indonesia in improving the empowerment of Indonesian women. The establishment of this programme has given substance to women's organizations in Indonesia that is by increasing the level of living standard for Indonesian women who have become members of women's organizations.

Keywords: Indonesia, Australia, MAMPU programme, women empowerment

Abstrak

Tujuan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui kemitraan yang di lakukan Indonesia-Australia melalui program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia dalam Penanggulangan Kemiskinan). Di dalam kerjasama ini terdapat 6 tujuan tematik dari program MAMPU yaitu: Meningkatkan akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial pemerintah, Meningkatkan akses perempuan pada pekerjaan serta menghilangkan diskriminasi di tempat kerja, Memperbaiki kondisi untuk migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri, Memperkuat kepemimpinan perempuan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi, Memperkuat kepemimpinan perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan. Peneliti juga menganalisa tentang manfaat kemitraan bagi masing masing organisasi perempuan yang bermitra dengan program MAMPU.

Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Sebagian besar data yang dikumpulkan berdasarkan observasi, studi kepustakaan, penelusuran data *online*. Penelitian ini

dilakukan di Kementerian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Kedutaan Australia. Hasil Penelitian ini menunjukkan adanya kerjasama antara Indonesia-Australia dalam pemberdayaan ekonomi perempuan Indonesia. Sejak tahun 2012 telah memberikan hasil yang berdampak baik untuk Indonesia dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan Indonesia. Di bentuknya program ini telah memberikan substansi terhadap organisasi perempuan di Indonesia yaitu dengan meningkatnya tingkat taraf hidup bagi perempuan Indonesia yang telah menjadi anggota dari organisasi perempuan.

Keywords: Indonesia, Australia, program MAMPU, pemberdayaan perempuan .

1. Pendahulan

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia sudah terjalin sejak masa perjuangan kemerdekaan Indonesia sampai saat ini. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia mengalami pasang surut terkadang berada di titik rendah terkadang berada di hubungan yang harmonis. Australia dan Indonesia memiliki sejarah yang berbeda dalam membangun negara masing masing dengan perubahan politik dan ekonomi yang berbeda. Kesetaraan dan keadilan gender merupakan hak penduduk perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan kesempatan yang sama, baik dalam hal mengakses, menerima manfaat, mengendalikan, maupun berpartisipasi dalam pembangunan. Kemiskinan menjadi salah satu ukuran untuk mengetahui tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Sebagai suatu ukuran agregat, tingkat kemiskinan penduduk di suatu wilayah lazim di gunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan seringkali di ukur berdasarkan perubahan pada tingkat kemiskinan. Meratifikasi konvensi CEDAW yang merupakan salah satu konvensi perempuan dengan UU Nomor 7 Tahun 1984. Ketertinggalan kaum perempuan ini dapat di lihat dari pembagian kerja secara seksual di dalam masyarakat, di mana peran perempuan adalah di lingkungan rumah tangga dan peran pria di luar rumah.

Pembagian pekerja secara seksual ini jelas tidak adil bagi perempuan sebab dapat menempatkan perempuan pada kedudukan *subordinate*/terpinggirkan terhadap pria sehingga cita-cita untuk mewujudkan perempuan sebagai mitra sejajar pria baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat sulit terlaksana. Untuk itu perlu adanya pemberdayaan perempuan sehingga tidak menempatkan perempuan pada kedudukan yang termajinalkan (*UN Women*), Konvensi ini adalah mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan *Convention On Elimination Discrimination Against Women* (CEDAW) di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Faktor ekonomi memang menjadi sangat berpengaruh terhadap kemampuan finansial seseorang. kondisi perempuan Indonesia yang memprihatinkan maka, pemerintah Indonesia diwakili oleh Kementerian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Pemerintah Australia yang diwakili oleh *Departement Of Foreign Australia Trade* (DFAT) meluncurkan kerjasama dalam upaya pengentasan kemiskinan, yang dinamakan **"Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan"** atau MAMPU. Program yang diluncurkan pada tahun 2012 dan di resmikan oleh perwakilan kedua pemerintahan ini dari pemerintah di

Indonesia di wakili oleh Kementerian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan dari pemerintahan Australia diwakili oleh *Departement Of Foreign Australia Trade* (DFAT), memusatkan fokus intervensi pada perempuan miskin dan organisasi-organisasi perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan miskin. Dengan melihat kondisi perempuan yang ada di Indonesia maka peneliti membuat penelitian tentang pemberdayaan perempuan Indonesia (http://dfat.gov.au/pages/default.aspx).

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Bagaimana kemitraan Indonesia-Australia dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Indonesia pada tahun 2012-2016?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Bagaimana implementasi dari Program MAMPU dalam Pemberdayaan Perempuan Indonesia ?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam Menjalankan Program MAMPU di Indonesia?
3. Prospek kinerja dari kemitraan Indonesia-Australia terhadap hasil pemberdayaan perempuan di Indonesia?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini pada hakekatnya mempunyai tujuan dan kegunaan yang dimaksud untuk mengetahui lebih jelas dari sumber yang akurat tentang program yang dilakukan Kementerian Badan Perencanaaan dan Pembangunan Nasional Indonesia terhadap program yang di bentuk melalui kemitraan yang dilakukan dengan pemerintah Australia terkait dengan penangulangan kemiskinan pada perempuan Indonesia dalam meningkatkan kemitraan untuk pemberdayaan perempuan.

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai peneliti yaitu:

a. Mengetahui implementasi dari program MAMPU dalam pemberdayaan perempuan Indonesia.
b. Untuk Mengetahui dan memahami kendala dari Kemitraan Indonesia -Australia melalui program MAMPU dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di Indonesia.
c. Untuk mengetahui perkembangan kinerja dari program yang telah dilakukan dan hasil yang didapatkan oleh perempuan Indonesia dalam memperoleh kehidupan yang lebih layak.

1.4 Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan mendapat pengetahuan secara teoritis maupun praktis.

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat berguna dan berkontribusi bagi perkembangan kerjasama Indonesia dan Australia dalam menyetarakan gender dapat menambah wawasan secara teoritis dalam perkembangan pemberdayaan perempuan dalam menanggulangi kemiskinan melalui organisasi perempuan. Dan dapat dijadikan sebagi bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian terkait topik ini. Bagi peneliti diharapkan peneliti diharapkan penelitian ini dapat memberi tambahan wawasan dan pengetahuan hubungan internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktik

Secara praktis di harapkan melalui penelitian ini dapat lebih berguna dalam memahami tentang kesetaraan gender. Melalui penelitian ini

Perempuan Indonesia semakin lebih maju dan mempunyai pemikiran yang inovatif dan modern karena perempuan zaman sekarang bukan lagi hanya bekerja di rumah. Sebagai upaya bagi perempuan untuk mendorong pemberdayaan dalam membangun perempuan dalam berbagai bidang.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Hubungan Internasional adalah hubungan antara dua atau lebih mencakup berbagai macam hubungan atau interaksi yang melintasi batas-batas wilayah negara dan melibatkan pelaku-pelaku yang berbeda kewarganegaraan, berkaitan dengan segala bentuk kegiatan manusia. Hubungan ini dapat berlangsung baik secara kelompok maupun secara perorangan dari suatu bangsa atau negara, yang melakukan interaksi baik secara resmi maupun tidak resmi dengan kelompok atau perorangan dari bangsa atau negara lain (Rudy, 2003: 3).

Dengan pemahaman bahwa gender adalah konsep di dalam kebudayaan masyarakat. Sejak abad 17 hingga abad 21 perjuangan feminisme telah mencapai perluasan wilayah dan dalam perkembangannya selama 20 tahun terakhir ini pertanyaan-pertanyaan mengenai gender menjadi sesuatu yang sangat menarik mengenai hubungan internasional.

Ketidaksetaraan gender akibat perbedaan jenis kelamin menjadi persoalan ketika hal tersebut mengakibatkan ketidakadilan gender. Namun dalam perkembangannya, memahami persoalan ketidakadilan gender tidak lagi cukup hanya dengan konsep gender yang sifatnya dikotomis yaitu hanya melihat perbedaan laki-laki dan perempuan.

> "konsepsi yang cenderung dikotomi ini tidak dapat menangkap kompleksitas gender dalam kehidupan manusia. Konsep gender seharusnya juga mampu mengakomodir fakta akan keberagaman dalam laki-laki maupun perempuan dan tidak secara mudah membuat dikotomi hanya antara dua jenis kelamin itu. Dalam konteks ini Connell menyoroti pluralitas dalam maskulinitas. bahwa karakter maskulin tidaklah tunggal namun beragam dan terdapat hegemonic masculinity sebagai salah satu karakter maskulin yang mendominasi dan menghegemoni struktur dan sistem internasional sehingga memarginalkan karakter lainnya. Jika kembali dikaitkan dengan persoalan ketidakadilan gender maka Connell menegaskan bahwa korban ketidakadilan gender tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki yang memiliki karakter maskulinitas tertentu" (Connel,2005:829-859).

faktor yang menyebabkan pemisahaan gender dan HI:

a. aktor tradisional HI didominasi oleh laki-laki seperti pembuat kebijakan nasional dan militer, posisi tentara dan posisi dalam diplomasi,
b. Terjadi pemisahan kedudukan perempuan dilihat dari studi HI yang banyak memfokuskan pada perang, perdagangan, pembentukan rejim dan pengembalian keputusan saat krisis, dan
c. Terjadinya penyamaan identitas negara dengan sifat maskulin seperti sifat kompetitif, rasional, egois, dan mencari kekuasaan (Sucipto, 2013:23).

Pemberdayaan perempuan berdasarkan analisis gender adalah membuat perempuan berdaya dalam memenuhi kebutuhan praktis gender dan kebutuhan strategis gender. Analisis kebutuhan praktis dan strategis berguna untuk

menyusun suatu perencanaan ataupun mengevaluasi apakah suatu kegiatan pembangunan telah mempertimbangkan ataupun ditujukan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan baik oleh laki-laki maupun perempuan (Moser & Daulay, 2006).

3.1 Desain Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian, diperlukan sebuah desain atau rancangan yang berisi rumusan tentang objek yang akan diteliti oleh peneliti. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode ini dipilih karena penelitian kualitatif bisa dilakukan oleh peneliti di bidang ilmu sosial dan politik, penelitian dalam metode ini tidak menggunakan analisis berupa grafik, bilangan dan numeral berdasarkan prosedur statistik.

Penelitian dalam metode ini menyoroti masalah terkait upaya dari Perempuan Indonesia dalam menangulangi Kemiskinan. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia, maka peneliti hanya melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS) dan Pemerintah Australia yang diwakili oleh. Untuk mengetahui sejauh mana Program Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU).

3.2 Informan Penelitian

Teknik Penentuan informan yang dipakai peneliti adalah dengan menggunakan teknik penentuan *purposive.* Yaitu peneliti menentukan pihak- pihak informan berdasarkan tujuan, masalah dan variable penelitian. Teknik yang digunakan adalah teknik wawancara sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Berkaitan dengan Kementerian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Pemerintah Australia dalam menanggulangi Kemiskinan Di Indonesia melalui program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan). Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara dengan Narasumber dari Badan Pembangunan Nasional dan pemerintah Indonesia dalam upaya terlasananya program MAMPU.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, penelusuran data *online*, dokumentasi, dan wawancara. Hal ini dikarenakan penelitian ini difokuskan pada sejauh mana berjalannya program Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) di Indonesia dengan mengolah data data yang diperoleh dari sumber yang relevan secara mendalam.

3.3.1 Studi Pustaka

Peneliti melakukan pengumpulan data melalui tulisan, artikel yang dikeluarkan oleh Kementerian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPENAS) dan Kementerian Luar Negeri serta menelaah teori, opini, membaca buku atau jurnal yang relevan dengan masalah yang diteliti. Peneliti juga menggunakan layanan internet dengan cara mengakses alamat situs berita online seperti detiknews, okezone, kompas dan situs berita lainnya serta situs resmi Program MAMPU, Kementerian Badan Pembangunan Nasional dan Kementerian Luar Negeri dalam melakukan pengumpulan data terkait penelitian yang akan dilakukan seta situs-situs lain terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu peneliti juga menggunakan metode dokumentasi, yakni mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang dikeluarkan oleh lembaga terkait Pemerintah Austalia, Kementerian Badan Pembangunan Nasional dan Kementerian Luar Negeri.

3.3.2 Penelusuran Data *Online*

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan layanan internet dengan cara mengakses alamat situs Kementerian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Program MAMPU serta situs lain yang terkait dengan segala informasi sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan dan dapat dipertanggung jawabkan secara akademis.

3.3.3 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan berita, data atau fakta untuk memperoleh keterangan. Pelaksanaannya dapat secara langsung, bertatap muka *(face to face)* dengan orang yang akan diwawancarai atau bisa secara tidak langsung dengan memanfaatkan akses teknologi melalui telepon, internet dan sebagainya. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai narasumber terkait masalah yang akan diteliti. Salah satu narasumber yang terkait yaitu Pihak Program MAMPU Indonesia yang ada di Jakarta untuk mengetahui apa saja yang sudah dilakukan Indonesia dan Australia dalam pencegahan dan penanggulangan kemiskinan bagi perempuan di di Indonesia di Indonesia. Selain itu peneliti melakukan wawancara dengan staf Kementerian Luar Negeri, Program MAMPU yang dibawahi oleh Kementerian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Indonesia dan Kedutaan Australia yang ada di Jakarta untuk menjawab pertanyaan penelitian.

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1.1 Kemitraan Indonesia-Australia

Hubungan bilateral antara Indonesia-Australia dalam berbagai bidang antara lain: sosial, budaya, ekonomi, pertahanan sudah dimulai sejak tahun 1970-an. Berbagai permasalahan yang telah dihadapi Indonesia dan Australia dalam menjalin kerjasama dan kemitraan cukup luas. Hubungan bilateral Indonesia dengan Australia telah diawali menjelang kemerdekaan negara Indonesia tahun 1945. Dukungan pemerintah Australia terhadap Indonesia cukup tinggi melihat letak wilayah Indonesia yang cukup strategis sebagai *partnership* bagi Australia.

4.1.1.1.1 Hubungan Politik

Hubungan Indonesia dan Australia pada era Soekarno terjadi pada rentang tahun 1945-1950 sangatlah kuat, karena Australia mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia atas Belanda. Hal ini diwujudkan dalam peran Australia sebagai mediator perundingan antara Indonesia dan Belanda dalam usaha memerdekakan diri. Hubungan bilateral Indonesia dan Australia pada era Soekarno dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu; Perang Dingin, dekolonisasi Irian Barat, dan rekonstruksi nasional di Malaysia. Namun, setelah Soekarno menjalankan politik luar negeri yang militan dalam usaha kampanye pembebasan Irian Barat sehingga menyebabkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia mulai beku dan merenggang. Oleh karena itu, kedua negara perlu terus mentransformasi berbagai tantangan dan potensi konflik menjadi ajang kerjasama yang menguntungkan kedua negara. Hubungan bilateral Indonesia dan Australia tergolong hubungan yang sangat unik, di satu sisi menjanjikan berbagai peluang kerjasama namun di sisi lain juga penuh dengan berbagai tantangan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai perbedaan menyolok diantara kedua negara dan bangsa bertetangga, yang terkait dengan kebudayaan, tingkat kemajuan pembangunan, orientasi politik yang mengakibatkan pula perbedaan prioritaskepentingan (Prasetyo, 2008:54).

4.1.1.1.2 Kerjasama Indonesia Dalam Bidang Pertahanan

Di bidang pertahanan keamanan Australia dan Indonesia membuat Perjanjian Pertahanan Keamanan. Perjanjian tersebut dibuat karena kedua negara ingin

memperkuat persahabatan yang ada di antara keduanya. Serta menjalin adanya komunikasi yang baik bagi kedua negara dalam menjalankan kerjasama.

4.1.1.1.3 Kerjasama Dalam Bidang Ekonomi

Di bidang ekonomi Indonesia dan Australia dengan gembira mengumumkan kesepakatan untuk memulai negosiasi kesepakatan yang dilakukan antara Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA) merupakan kerjasama yang dilakukan Indonesia-Australia dalam membangun dan membuka pasar baru dan peluang bisnis,produsen utama dan layanan investor

4.1.1.1.4 Kerjasama Dalam Bidang Kesehatan

Australia berkomitmen untuk membantu pemerintah Indonesia dalam bidang kesehatan. Australia membantu memperkuat kapasitas Indonesia dalam menangani kasus HIV/AIDS melalui program kemitraan senilai $100juta atau sekitar Rp800 miliar. Selain itu, saat ini juga telah terjalin kemitraan antara Australia dan Indonesia di dalam penanggulangan penyakit mata di Indonesia khususnya bali. Hal ini ditunjukkan dengan itikad baik kedua negara membangun pusat mata Australia-Bali, di Denpasar, Bali. Pusat mata itu sendiri telah diresmikan pada 27 Juli 2007 oleh pemimpin kedua negara. Kerjasama tersebut diperlukan guna meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik bagi kesejahteraan warga negara terkhusus bagi Indonesia dan untuk memperbaiki kesehatan warga negara Indonesia semakin lebih baik dalam pemenuhan kesehatan negara

4.1.1.1.5. Bidang Pendidikan

Indonesia dan Australia menjalin hubungan yang kuat dalam bidang pendidikan. Indonesia adalah tujuan paling populer bagi siswa di bawah rencana New Colombo pemerintah Australia, sebuah inisiatif untuk mendorong orang muda Australia untuk bekerja dan belajar di wilayah ini. New Colombo Plan akan mendukung lebih dari 3.000 siswa Australia untuk tinggal, belajar dan melakukan penempatan kerja di Indonesia pada akhir 2017 yang mewakili hampir seperlima dari keseluruhan. Program beasiswa dilakukan oleh pemerintah Australia dalam mendukung masyarakat untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui pendidikan.

4.1.1.1.6 Kerjasama Dalam Bidang Pembangunan

Program bantuan luar negeri pemerintah Australia telah membantu meningkatkan taraf kehidupan jutaan jiwa di negara-negara berkembang. Program bantuan ini mendukung kepentingan nasional Australia dengan berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi dan menurunkan kemiskinan di negara-negara berkembang.

Australia memfokuskan bantuannya di wilayah-wilayah yang paling membutuhkan dan bantuan bisa digunakan secara efektif dan efisien. Pemerintah Australia bekerja dalam kemitraan bersama negara-negara berkembang untuk merencanakan dan menjalankan program-program bantuan, termasuk aksi tanggap kemanusiaan

4.1.1.2 Kondisi Perempuan Indonesia

Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dilandaskan pada pasal 27 UUD 1945 dan di perkuat melalui ratifikasi Konvensi Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) ke dalam UU NO.7 tahun 1984, serta landasan aksi dan Deklarasi Beijing hasil konferensi dunia tentang perempuan ke-empat di Beijing pada tahun 1995. Berpacu dalam UU tersebut juga belum dapat menyetarakan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam berbagai

bidang kehidupan dan pembangunan UN Women. ”Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)” kondisi perempuan Indonesia dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, ekonomi masih menunjukkan bahwa perempuan Indonesia masih belum sejahtera dibandingkan dengan persentase laki laki yang belum selaras dengan kesetaraan gender perempuan dan pemberdayaan perempuan masih rendah baik yang tinggal di perkotaan maupun yag tinggal di pedesaan perbedaan tersebut masih signifikan.

4.1.1.3 Program MAMPU

Kerjasama yang dilakukan Indonesia-Australia untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan pengentasan kemiskinan. Kerjasama antara Indonesia dan Australia pada tahun 2012 yang menandatangani Subsidiary Arrangement yang di wakili oleh Kementerian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPENAS) serta dari pihak Australia yang di wakili oleh *Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)*. Program MAMPU terbagi atas 2 fase yaitu fase pertama telah berlangsung pada tahun 2012 sampai tahun 2016. Dukungan yang dilakukan pemerintah Australia terhadap peningkatan pemberdayaan Indonesia ditunjukkan oleh pemerintah Australia dengan cara bermitra dengan organisasi perempuan yang ada di Indonesia dalam mendukung pemberdayaan perempuan Indonesia dan kesetaraan gender di Indonesia

4.2 Analisa Hasil Dan Pembahasan

4.2.1 Implementasi Program MAMPU terhadap Peningkatan Pemberdayaan Perempuan di Indonesia

Dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional banyak interaksi yang terjadi meliputi perilaku perang, kerjasama, konflik, koalisi dan pembentukan aliansi. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan bentuk interaksi negara pada kerjasama yang di lakukan oleh Indonesia-Australia pada tahun 2012 melakukan kerjasama untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.

Peningkatan pemberdayaan perempuan Indonesia masih rendah terlihat dari tingkat kesejahteraan perempuan yang tergolong rendah di bandingkan dengan negara negara lain seperti negara maju. Hal tersebut menjadi faktor dari hasil kerjasama Indonesia dan Australia untuk pengentasan kemiskinan bagi perempuan Indonesia melalui implementasi dari program MAMPU untuk memperbaiki kesejahteraan perempuan Indonesia.

4.2.2 Kendala Yang Di hadapi Oleh Indonesia Dalam Menjalankan Program MAMPU Di Indonesia

Dalam memaknai filantropi dari perspektif perempuan yang di adakan di Jakarta pada tahun 2016 yang di selenggarakan oleh MAMPU dalam IPFest bahwa program MAMPU mendorong perempuan Indonesia untuk mendapatkan akses-akses terhadap layanan-layanan dalam meningkatkan kesejahteraan. Dalam penjelasannya bahwa organisasi dari program MAMPU sedikit banyaknya telah membantu pemerintah Indonesia dalam menyuskeskan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Dalam menjalankan program MAMPU terdapat kendala dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan. Jumlah organisasi perempuan yang bermitra dengan program MAMPU yang tinggi juga tetap masih mempunyai kekurangan dalam mengelola dan memberdayakan perempuan Indonesia. Menurut Nurul dari kedudukan ketenagakerjaan, Kementerian Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional adalah kurangnya kesadaran dari masyarakatnya sendiri dalam meningkatkan pembangunan pemikiran terhadap kesetaraan gender karena dalam mengakses sumber daya masuk ke dalam *time poverty*

(miskin waktu), Kemudian di lihat dari nilai kebudayaan yang mana pengaruh nilai budaya ini sangat mempengaruhi tingkat kesetaraan dalam pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan.

4.2.3 Hasil Kinerja dari Kemitraaan Antara Indonesia dan Australia Dalam Program MAMPU untuk Pemberdayaan Perempuan Melalui Mitra MAMPU

Dalam menjalankan program MAMPU dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun banyak dampak yang di hasilkan dan yang di peroleh oleh organisasi perempuan yang bermitra dengan program MAMPU yaitu KOMNAS perempuan pada akhirnya mengolkan undang undang tentang penghapusan kekerasan seksual terhadap legislatif parlemen nasional untuk tahun 2015-2019. Mitra dari program MAMPU (PEKKA) telah mempengaruhi revisi instrumen survey nasional untuk memasukkan rincian kepada keluarga perempuan. Mitra MAMPU yaitu Migrant Care telah memberikan memberikan kontribusi terhadap undang undang tentang penempatan dan perlindungan buruh migran nasional yang sedang di pertimbangkan oleh parlemen nasional tahun 2015.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kerjasama antara Indonesia dan Australia Adanya hubungan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia dalam berbagai sektor salah satunya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Australia (melalui DFAT).

Alasan Australia menjalin kerjasama dan membentuk program MAMPU (Maju Perempuan Indonesia Untuk Penangulangan Kemiskinan) dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional Australia, Australia melihat bahwa Indonesia ialah negara yang memiliki potensi besar dan peran besar di kawasan asia tenggara. Hal ini membuat Australia tetap ingin menjalin hubungan dengan membuat berbagai kerjasama salah satunya ialah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuandalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi perempuan Indonesia.

Pertama, mengenai kerjasama yang dilakukan ini adalah Perberdayaan perempuan. Dibentuknya suatu program yang disebut dengan Program MAMPU ini untuk membantu perempuan perempuan miskin Indonesia untuk meningkatkan perekonomian perempuan Indonesia. Kerjasama ini dilakukan pada tahun 2012 melalui adanya program MAMPU telah banyak dilakukan kegiatan kegiatan yang mendukung perempuan Indonesia dalam meningkatkan perberdayaan ekonomi perempuan Indonesia dimana perempuan tidak hanya duduk lagi sebagai ibu rumah tangga namun mereka mempunyai aktivitas yang lebih produktif.

Implementasi dari kerjasama Indonesia-Australia untuk pemberdayaan perempuan yang di implementasikan oleh mitra organisasi perempuan dari kerjasama ini terbantunya organisasi organisasi yang bermitra dengan program MAMPU sehingga dapat memepermudah akses dari kementerian badan pembangunan nasional dalam mengelola kerjasama ini untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan dan menyukseskan *Sustainable Development Goals*(SDGs) di Indonesia.

Namun, pengembangan kapasitas adalah proses jangka panjang dan bukan tonggak sejarah, dan penting bahwa MAMPU beberapa hambatan juga. Untuk maju menuju peningkatan kapasitas dan kesiapan, Mitra terlebih dahulu harus segera mendapat reaksi positif terhadap dukungan MAMPU (pelatihan, lokakarya, bantuan teknis, dll.). Ini berarti mereka menemukan dukungan agar sesuai dengan pekerjaan mereka, berguna, dan bahwa proses pelatihan sesuai.

Hasil dari kinerja proram MAMPU dalam kurun waktu kurang lebih 4 tahun

yaitu KOMNAS Perempuan pada akhirnya gagal menggolkan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Agenda Legislatif Parlemen Nasional untuk tahun 2015 -2019. Mitra MAMPU yaitu PEKKA telah mempengaruhi revisi instrumen survei nasional untuk memasukkan rincian kepala keluarga perempuan. Mitra MAMPU juga telah mempengaruhi implementasi kebijakan. Mitra telah memperbaiki cara pengumpulan data untuk memastikan perempuan miskin menerima layanan yang mereka memenuhi syarat. Dan mereka telah membantu perempuan setempat menyuarakan prioritas mereka dan mempengaruhi pengambilan keputusan di tingkat desa.Temuan ketiga adalah ada indikasi awal bahwa MAMPU berkontribusi terhadap perbaikan luas bagi perempuan miskin di Indonesia. Kisah Kinerja menunjukkan bahwa lebih banyak wanita mengakses layanan daripada sebelum MAMPU. Kisah Kinerja juga menunjukkan bahwa setidaknya empat mitra MAMPU melaporkan tanggapan pemerintah yang berhasil terhadap perempuan yang menuntut layanan baru atau yang lebih baik. Untuk menindaklanjuti program MAMPU pemerintah Indonesia dan Australia masih melanjutkan kemitraan ini ke Program MAMPU fase 2.

5.2 Saran

Dengan adanya Kerjasama program MAMPU ini di pandang baik karena akan meningkakan tingkat kesejahteraaan perempuan. Indonesia dan Australia sebagai negara yang bertetangga dekat sebaiknya selalu menjalin dan memelihara hubungan baik dan harmonis, dalam menjalankan kerjasama meskipun memiliki berbagai perbedaan. Sebaiknya pemerintah memperluas wilayah kinerja program MAMPU di wilayah wilayah yang terpencil.

Dengan adanya program MAMPU dapat di implementasikan dalam tiap tiap undang-undang yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dengan meningkatkan ekonomi perempuan. Dengan adanya tujuan area tematik itu akan membantu pemberdayaan ekonomi perempuan Indonesia. Pemerintah harus bekerja keras untuk membantu perempuan dalam mewujudkan kesejahteraan perempuan dan hukum terhadap perempuan ada yang menjaminnya supaya ketika dilapangan ada kekuatan perempuan secara hukum yang menjamin kesejahteraan perempuan. Indonesia diharapkan sebagai penerima manfaat dari program ini dapat mengoptimalkan dari manfaat yang diberikan pemerintah Australia terkait dengan pemberdayaan perempuan Indonesia. Walaupun dalam pelaksanaannya dari program MAMPU sebagian telah terlaksana namun masih banyak permasalah permasalahan yang dihadapi baik masalah kecil maupun besar ketika terjun ke organisasi perempuan maupun yang bermitra dengan program MAMPU.

Sebaiknya meningkatkan potensi dari sumber daya manusia terlebih perempuan dalam melakukan pelatihan dan memperluas akses perempuan didalam berbagai bidang misalnya dalam bidang ekonomi,politik dan yang lainnya. Dengan di berikannya akses atau kemudahan dapat memberikan peluang yang besar bagi perempuan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ambarita dan Subarno Wijatmadja, 2016, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Malang:Cita Intrans Selaras.

Rudy, T. 2002. *Study Strategis dalam transformasi sistem Internasional Pasca Perang dingin.* Bandung: Refika Aditama.

Rudy, T. May. 2003. *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah global:* Isu, Bandung: Refika Aditama.

Sucipto,Anie, 2013, *Gender Dalam Hubungan Internasional*, Jakarta:Jala sutra

AusAId (2012) MAMPU Indonesia maju perempuan Indonesia untuk penanggulangan kemiskinan(empowering Indonesia for poverty reduction) program design document.

Connell, R.W. dan James W. Messerschmidt, "Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept", Gender and Society 19 (2005): 829-859.

Daulay, H. (2006). Pemberdayaan perempuan (Studi kasus pedagang jamu di Gedung Johor Medan). Jurnal Harmoni Sosial Volume I No. 1 Departemen Sosiologi FISIP USU, 7-14.

C.Rujukan Elektronik

Dokumen http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/mampu-gender-poverty-wellbeing-background-assessment.pdf

Dokumen http://dfat.gov.au/about-us/publications/Pages/empowering-indonesian-women-for-poverty-reduction-mampu-program-design-document.aspx

Dokumen http://dfat.gov.au/about-us/publications/Documents/mampu-strengthening-womens-access-employment-sumartra-java.pdf

Kerjasama bilateral http://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran pers/penandatanganan-subsidiary-arrangement-program-mampu-kemitraan-australia-dan-indonesia-untuk-pemberdayaan-perempuan-fase-ii/.

Pemberdayaanperempuanhttp://www.mampu.or.id/en/content/women%E2%80%99s-livelihoods-challenges-and-economic-empowerment-mampu-partners-and-subpartners

Mitra MAMPU http://www.mampu.or.id/id/content/penghidupan-perempuan-miskin-dan-akses-mereka-terhadap-pelayanan-umum.

ProgramMAMPU(http://dfat.gov.au/aboutus/publications/Pages/empowering-indonesian.women-for-poverty-reduction-mampu-program-design-document.aspx).

Perjanjian Indonesia-Australia (https://dokumen.tips/documents/perjanjian-australia-indonesia-di-bidang-ankeamanan.html).

Bantuan Australia terhadap mitra MAMPU untuk organisasi perempuan aisyaiah ,(http://indonesia.ucanews.com/2013/03/08/australia-dan-tujuh-lsm-indonesia dukung-pemberdayaan-perempuan-miskin/